ABSTRAK

Muhammad Ridha Fadillah. 2022. *Perspsi Akademisi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Terhadap Politisi Yang Membawa Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar“iyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Sulaiman Kurdi, S. Ag M.Si. (II) Farihatni Mulyati,S.Ag.,MHI.

Kata Kunci: Persepsi, Pemilihan Kepala Daerah, Membawa Simbol Agama dalam Pemilihan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya para politisi yang membawa agama dalam berpolitik di pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banjar tahun 2020 seperti menggunakan simbol agama, kata-kata Al-Quran dan membawa ulama atau habib dalam berpolitik, dengan ini mereka menggunakan agama untuk kepentingan mereka dalam meraih kekuasaan, akademisi UIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara sebagai responden dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para akademisi terhadap politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banjar tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Penulis mengumpulkan data-data wawancara dengan Akademisi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dan observasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses koleksi data, editing data, dan interpretasi data. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yang telah ada.

Hasil penelitian ini adalah bahwa agama jangan sampai disalahgunakan agama tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata. Seharusnya agama menjadi pedoman, serta memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara, pendisiplinan masyarakat, dan mengontrol manusia dalam melakukan kegiatan berpolitik dalam membangun negeri dan juga agar manusia tidak melampaui batas.